

## **BAB I PENDAHULUAN**

### **1.2 Latar Belakang**

Menurut Sukirno (2008) pertumbuhan ekonomi merupakan berkembangnya kegiatan ekonomi, yang berdampak pada peningkatan barang dan jasa sehingga dapat mempengaruhi kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat. Dapat diartikan bahwa semakin tinggi pertumbuhan ekonomi maka akan semakin tinggi pula tingkat kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat, dan semakin rendah pertumbuhan ekonomi maka akan menurunkan tingkat kesejahteraan masyarakat yang akan menimbulkan permasalahan yang harus dihadapi pemerintah.

Pertumbuhan ekonomi dapat dilihat dari proses dimana terjadinya peningkatan Produk Domestik Bruto (PDB). PDB meningkat dilihat dari peningkatan jumlah barang dan jasa pada suatu wilayah. Peningkatan PDB inilah yang menjadi pengukur persentase apakah pertumbuhan ekonomi sedang mengalami penurunan atau peningkatan (Purnama, 2015).

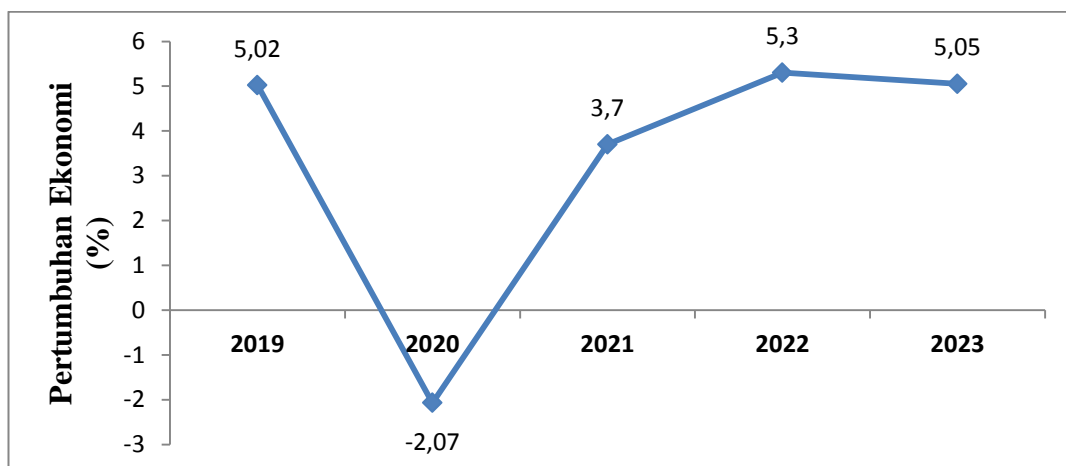
Produk Domestik Bruto (PDB) terbagi atas 2 macam, yaitu Atas Dasar Harga berlaku (ADHB), dan Atas Dasar Harga Konstan (ADHK). PDB ADHB adalah nilai tambah barang dan jasa yang dihitung berdasarkan harga yang berlaku pada setiap tahunnya, sedangkan Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) adalah nilai tambah barang dan jasa yang dihitung berdasarkan harga yang berlaku dan satu tahun tertentu sebagai dasar. ADHK ini lah yang menjadi patokan dalam perhitungan pertumbuhan ekonomi (BPS Indonesia, 2024).

Tujuan utama dari pertumbuhan ekonomi adalah menciptakan kesejahteraan dan kemakmuran bagi masyarakat, maka dari itu selain harus terus meningkat, pertumbuhan ekonomi juga harus berkualitas, yang dapat diartikan bahwa pertumbuhan ekonomi meningkat dan semua tingkatan masyarakat harus mendapatkan manfaatnya. Pertumbuhan ekonomi juga menjadi tolak ukur sejauh mana aktivitas perekonomian yang dapat mempengaruhi pendapatan masyarakat pada periode tertentu. Apabila pendapatan riil masyarakat lebih besar dibanding dengan periode sebelumnya maka dapat dikatakan pertumbuhan ekonomi mengalami peningkatan (Ginting et al., 2020)

BPS Indonesia (2019) juga mencatat bahwa pada masa pemerintahan Gusdur tahun 1999 perekonomian Indonesia sudah mulai kembali positif setelah krisis ekonomi tahun 1998, dimana pada tahun pertama Gusdur pertumbuhan ekonomi Indonesia mencapai 4,92% pada tahun 2000 namun turun pada tahun berikutnya turun menjadi 3,64%. Gusdur dimakzulkan pada tahun 2001 dan digantikan oleh wakil presiden pada saat itu yaitu Megawati, yang dimana pada masa Megawati pertumbuhan ekonomi Indonesia saat itu mengalami kenaikan yang terus menerus, seperti pada tahun 2002 pertumbuhan ekonomi mencapai 4,5% dan naik menjadi 4,7% pada tahun 2003 dan terus naik menjadi 5,03 pada tahun 2004. Presiden berikutnya SBY cukup baik dalam menjaga pertumbuhan ekonomi, dalam 10 tahun masa kepemimpinannya pertumbuhan ekonomi melaju pada kisaran 5%-6%, pencapaian terendah pada tahun 2009 mencapai 4,63% dikarenakan tekanan global yang berdampak pada pelemahan rupiah. Pada masa

pemerintahan Jokowi pertumbuhan ekonomi dapat dikatakan cukup stabil berkisar pada 4%-5%, cukup stabil namun tidak mengalami kenaikan secara signifikan.

Pertumbuhan ekonomi di Indonesia masih dalam keadaan yang cukup stabil namun stagnan, dimana pada saat ini pertumbuhan ekonomi hanya berkisar pada 5%. Banyak faktor yang membuat pertumbuhan ekonomi menjadi stagnan, baik dari faktor eksternal maupun internal. Faktor internal ialah seperti ketersediaan sumber daya alam, tenaga kerja, infrastruktur, serta kebijakan pemerintah. Faktor eksternal yaitu investasi luar negeri, neraca pembayaran dan perdagangan internasional (Ginting, 2023). Berikut merupakan pertumbuhan ekonomi di Indonesia pada periode 2019-2023:



Sumber : *World Bank*, 2024

**Gambar 1. 1 Pertumbuhan Ekonomi Indonesia tahun 2019-2023 (Persen)**

Gambar 1.1 di atas menunjukkan pertumbuhan ekonomi di Indonesia dalam kurun waktu 5 tahun, dimana terhitung dari tahun 2019 sampai tahun 2023 mengalami fluktuasi. Pertumbuhan ekonomi tertinggi pada tahun 2022 yaitu

sebesar 5,3% dan pertumbuhan ekonomi terendah berada di tahun 2020 mencapai minus 2,07%.

Pada tahun 2022 menjadi pertumbuhan ekonomi Indonesia mencapai 5,3% didukung oleh peningkatan dari industri pengolahan, perdagangan, pertanian, dan konstruksi, pengendalian inflasi yang cukup stabil dimaraknya perang pasar global, serta penerimaan pajak yang meningkat pada tahun 2022 (Kemenkeu, 2024).

Tahun 2019 pertumbuhan ekonomi sebesar 5,02% disebabkan oleh ekspor mengalami kontraksi. Industri terkuat di Indonesia seperti perdagangan konstruksi dan pertanian pada saat itu mengalami penurunan yang berdampak pada pertumbuhan ekonomi 2019 (BPS Indonesia, 2020).

Pertumbuhan ekonomi terus menurun disebabkan wabah Covid-19 pada tahun 2020 sehingga terjadi penghambat dalam aktivitas perekonomian seperti tutupnya pabrik-pabrik, tertutupnya jalur distribusi, ekspor yang menurun, penurunan ekonomi global yang berdampak pada turunnya investasi yang masuk ke Indonesia (BKF Kemenkeu, 2021)

Pada tahun 2021 Pemerintah merealisasikan Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) seperti meningkatkan daya beli masyarakat, memberi bantuan subsidi, hingga pemotongan bunga kredit pinjaman untuk pelaku usaha UMKM. Program ini dinilai berhasil dikarenakan pertumbuhan ekonomi di tahun 2021 mencapai 3,7% dan kembali meningkat pada tahun 2022 mencapai 5,3% ekonomi kembali memulih seperti Pra-covid (DJKN.Kemenkeu, 2023).

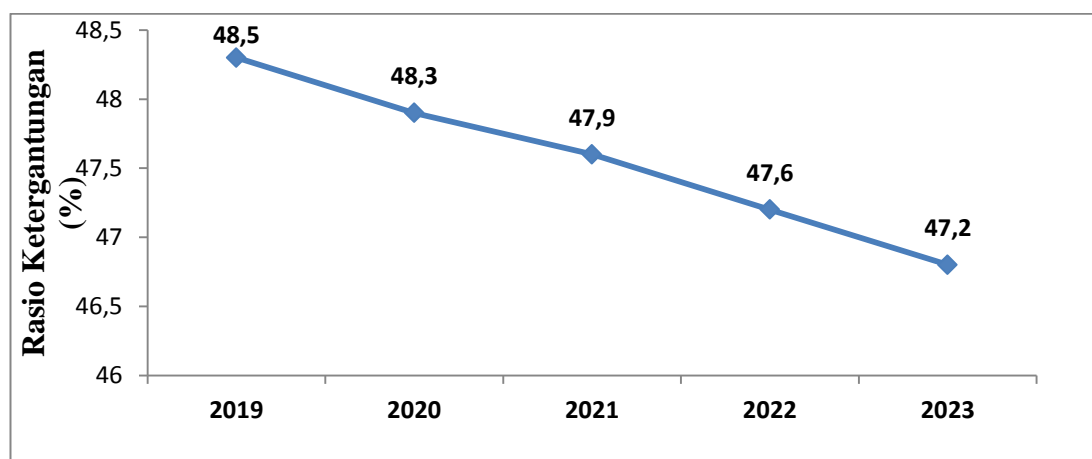
Menurut Wongboonsing (2003) salah satu faktor yang menjadi pemicu dari pertumbuhan ekonomi adalah bonus demografi. Bonus demografi merupakan keuntungan ekonomis dimana ketika jumlah penduduk pada usia produktif meningkat, sehingga penduduk di Indonesia didominasi oleh rentang usia yang produktif. Bonus demografi menciptakan keuntungan ekonomis karena menurunnya rasio ketergantungan penduduk, terutama akibat penurunan fertilitas dalam jangka panjang (Sheykal, 2024).

Dengan naiknya usia produktif di Indonesia maka tingkat rasio ketergantungan di Indonesia akan menurun. Apabila rasio ketergantungan di Indonesia sebesar 47% maka dapat diartikan bahwa dalam 100 jiwa penduduk yang usia produktif harus menanggung 47 jiwa penduduk yang berusia tidak produktif. Hal ini harus dimanfaatkan semaksimal mungkin agar Indonesia mendapat keuntungan ekonomi dari penambahan penduduk yang berusia produktif (Nasution, 2021).

Dengan rasio ketergantungan yang semakin lama semakin kecil, maka penduduk yang berusia produktif dapat mengalihkan sumber daya yang sebelumnya digunakan untuk keperluan tanggungan kepada usia non-produktif dan dialihkan pada peningkatan produktivitas yang akan mempengaruhi roda perekonomian (BPS Indonesia, 2022).

Hasil sensus penduduk 1970-2020 mengalami perubahan kondisi komposisi penduduk. Persentase penduduk berusia produktif mengalami kenaikan sebesar 17% sejak 1971 sehingga rasio ketergantungan pada tahun 2020 mencapai angka 40%. Selama periode 2015-2020 rasio ketergantungan umur

(RKU) mengalami penurunan yang dapat diartikan bahwa usia produktif lebih banyak dibanding usia non produktif, yang dimana menurut penelitian dari Kinugasa dan Mason (2007) fenomena ini menggambarkan bahwa akan banyak sumber daya yang tersedia untuk melakukan konsumsi dan investasi yang akan berdampak pada penurunan angka kemiskinan. Penelitian Kinugasa dan Mason ini sejalan dengan turunnya tingkat kemiskinan sebanyak 1,66% pada tahun 2019 dari tingkat kemiskinan 8,22% di tahun 2015, namun RKU menurun pada tahun 2020 dan tingkat kemiskinan meningkat sebesar 7% pada tahun 2020 dikarenakan kasus Covid-19 (BPS Indonesia, 2023). Berikut merupakan rasio ketergantungan pada periode 2019-2023:



Sumber : *World Bank, 2024*

**Gambar 1. 2 Rasio Ketergantungan Indonesia tahun 2019-2023 (Persen)**

Gambar 1.2 di atas terlihat pada 2019-2023 rasio ketergantungan atau rasio beban yang harus ditanggung oleh usia produktif terhadap usia non-produktif terus mengalami penurunan. Penurunan dari rasio ketergantungan ini

ialah disebabkan oleh berkurangnya jumlah penduduk non-produktif yang harus ditanggung oleh penduduk yang produktif.

Rasio ketergantungan pada tahun 2018 ialah 48,4%, terus menurun di tahun 2019 menjadi 48,3%, sehingga mencapai angka 47,2% di tahun 2022. Meskipun persentase yang turun hanya sedikit, rasio ketergantungan tetap mengalami penurunan di setiap tahunnya. Penyebab dari turunnya rasio ketergantungan di Indonesia ialah menurunnya *total fertility rate* yang merupakan dampak dari berhasilnya pengendalian kuantitas penduduk melalui program keluarga berencana. hal ini juga sejalan dengan meningkatnya penduduk usia lanjut sebagai dampak dari berhasilnya meningkatnya kualitas hidup penduduk Indonesia yang dapat dilihat dari peningkatan angka harapan hidup di Indonesia (Kemenko Pmk, 2020).

Pada tahun 2019 rasio ketergantungan mengalami penurunan sebesar 48,3% dari tahun sebelumnya. Akan tetapi, pertumbuhan ekonomi pada tahun 2019 juga mengalami penurunan sebesar 5,02%. Hal ini bertentangan dengan teori ekonomi menurut Solow, yang menyatakan bahwa bagaimana pertumbuhan modal, pertumbuhan tenaga kerja (populasi penduduk), dan teknologi berinteraksi dalam mempengaruhi pertumbuhan ekonomi. Solow berasumsi bahwa terdapat hubungan konstan antara modal dan tenaga kerja, dimana pertumbuhan output yaitu pertumbuhan ekonomi ialah merupakan hasil dari kombinasi antara modal dan tenaga kerja (Fatmawati & Syafitri, 2015).

Selain bonus demografi ada faktor lain yang dapat mempengaruhi pertumbuhan ekonomi yaitu investasi. Harrod Dommar dalam dalam Jhingan

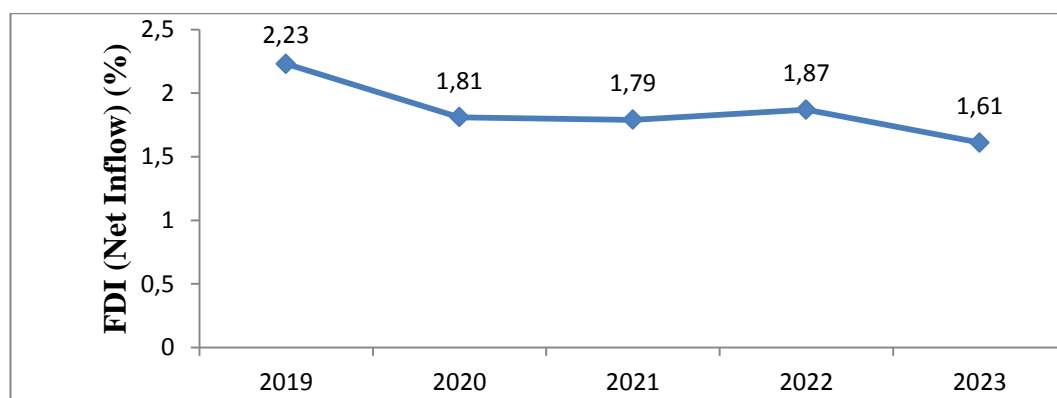
(2000) menyatakan bahwa investasi memiliki hubungan yang positif terhadap perekonomian negara. Semakin mudah investasi yang dibuat oleh negara, maka semakin mudah pula investor masuk untuk berinvestasi, dengan banyaknya investasi maka akan menambah pendapatan negara tersebut (Apriansyah & Bachri, 2006).

Investasi merupakan salah satu variabel yang mampu menjelaskan bagaimana cara mendorong pertumbuhan ekonomi. Dalam penghitungan pendapatan nasional metode pengeluaran, investasi juga merupakan salah satu komponen pendapatan nasional. Dapat dikatakan investasi merupakan suatu persamaan identitas dari pertumbuhan ekonomi (Hariwijaya, 2020).

Investasi dibagi atas dua, yaitu investasi asing atau penanaman modal asing, investasi ini ialah orang atau perusahaan luar negeri yang menanamkan modalnya kepada negara lainnya. Investasi lainnya disebut dengan penanaman modal dalam negeri, yang dimana pada investasi ini orang atau perusahaan lokal yang menanamkan modalnya di negaranya sendiri. Cara melakukan investasi pun dapat dibedakan menjadi dua, yaitu investasi portofolio yang dimana pada cara ini investor tidak berhubungan langsung pada aset yang diinvestasikan, sedangkan investasi asing langsung atau *Foreign Direct Investment* (FDI) ialah berupa investasi yang investor dapat mengelola dan mengendalikan langsung aset atau bisnis yang telah diinvestasikan di negara lain (Indrawati, 2012). Selain dengan penerimaan total FDI yang masuk ke suatu negara, FDI juga dapat dilihat melalui rasio *net inflow* FDI terhadap PDB di negara tersebut.



Secara umum, nilai FDI di Indonesia pada periode 2010-2019 mengalami kecenderungan meningkat setiap tahunnya, kecuali 2018 mengalami penurunan sebesar Rp. 43,9 triliun atau sebesar 10 persen dari tahun sebelumnya. Pada 2019 kembali mengalami peningkatan sebesar 7,74 persen. Penurunan yang cukup drastis pada 2018 disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain adalah sentimen perang dagang Amerika Serikat dengan Tiongkok, pengetatan kebijakan moneter di Amerika Serikat yang berefek pada arus keluar dari negara-negara emerging market. Berdasarkan sektor, sektor manufaktur atau industri pengolahan merupakan sektor terbesar penempatan FDI dalam satu dekade terakhir. Nilai kumulatifnya mencapai US\$112,2 miliar. Artinya, sektor manufaktur merupakan sektor primadona bagi investor asing. Sedangkan primadona berikutnya adalah sektor jasa (US\$100,9 miliar) dan sektor pertambangan (US\$36 miliar) (DPR RI, 2020). Berikut merupakan rasio *Net Inflow* FDI terhadap PDB Indonesia pada periode 2019-2023:



Sumber : World Bank, 2024

**Gambar 1. 3 Rasio FDI *Net Inflow* terhadap PDB ADHK tahun dasar 2015 Indonesia Tahun 2019-2023 (Persen)**

Pada Gambar 1.3 di atas dapat dilihat bahwa penerimaan FDI di Indonesia dalam kurun waktu 2019-2023, dimana persentase *Net Inflow* FDI terhadap PDB

di Indonesia cenderung naik. FDI pernah menurun pada tahun 2020, namun keadaan kembali membaik dan meningkat di tahun 2023.

Pada tahun 2019 presentase *Net Inflow* FDI terhadap GDP sebesar 2,23% namun karena ada wabah Covid-19 yang membuat lemah perekonomian Global, nilai FDI terhadap PDB di Indonesia menurun menjadi 1,81% pada tahun 2020 (Djkn Kemenku, 2023).

Pada tahun 2021 pemerintah mulai melakukan pemulihan ekonomi, pada tahun ini ekonomi global juga sudah mulai membaik, namun di tahun 2021 nilai FDI terhadap PDB di Indonesia semakin mengalami penurunan dari tahun 2020 yaitu sebesar 1,810 %. Pada tahun 2022 kontribusi FDI terhadap GDP Indonesia kembali mengalami peningkatan yaitu sebesar 1,87 % . Menurut laporan dari *United Nation Conference Trade And Development* (UNTAD) (2023) Indonesia menjadi negara Asia Tenggara yang menerima FDI terbanyak setelah Singapura.

Bagi negara berkembang investasi sangatlah diperlukan, dikarenakan negara berkembang belum mampu untuk mendanai negaranya sendiri. Salah satu kelebihan dari investasi ialah dimana tidak ada kewajiban dari Indonesia untuk mengembalikan dana yang sudah masuk ke Indonesia. Investasi asing langsung menguntungkan bagi negara berkembang terkhusus negara Indonesia yang masih belum mampu mandiri untuk mengembangkan negaranya sendiri tanpa bantuan dari pihak lain. Dengan adanya investasi asing langsung maka akan memberikan teknologi baru, ilmu pengetahuan baru, keterampilan baru, pembaharuan produk, dan lain-lain (Muzakki & Sukim, 2022).

Dari data kontribusi FDI terhadap PDB Indonesia dapat dilihat pada tahun 2021 sebesar 1,81% , kemudian pada tahun 2021 mengalami penurunan menjadi 1,79%. Melihat penurunan FDI pada tahun 2021 sebesar 13,9%, akan tetapi pertumbuhan ekonomi pada tahun 2021 mengalami peningkatan menjadi 3,7% lebih banyak dari tahun sebelumnya. Hal ini bertentangan dengan teori yang dinyatakan oleh Harrod Dommar dalam (Apriansyah & Bachri, 2006).

Walaupun investasi sangat diperlukan dalam negara berkembang, namun penerimaan pajak merupakan penerimaan negara yang terbesar dan paling utama. Secara umum pajak dapat diartikan sebagai iuran umum yang harus dibayar oleh setiap warga negara Indonesia, yang bersifat memaksa menurut Undang-undang.

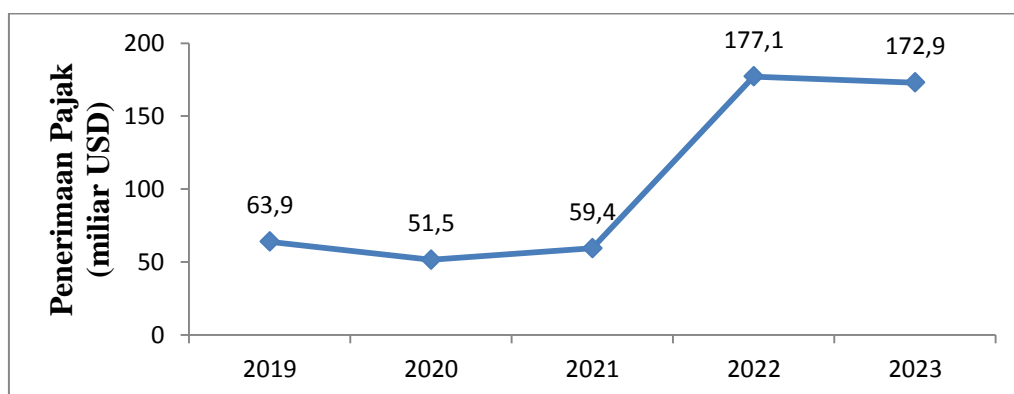
Sumber pendapatan Indonesia dari pajak ini merupakan hal yang penting agar pemerintah dapat menjalankan kebijakannya dalam mengembangkan sebuah negara. Penerimaan pajak digunakan Pemerintah untuk membiayai semua pengeluaran Pemerintah, baik belanja negara ataupun biaya pengeluaran untuk pembangunan (Sinaga, 2016).

Ekonom yang menyatakan bahwa penerimaan pajak merupakan pemasukan penting bagi negara yang akan mempengaruhi pertumbuhan ekonomi ialah Robbert Barro dan temannya Martin. Menurut Barro dan Martin kebijakan fiskal maupun kebijakan moneter sangat membantu negara dalam jangka panjang. Tahun 1995 Barro bersama temannya Martin memberikan istilah *Growth Maximizing Tax Ratio* (GMTR), Barro mengatakan bahwa berbagai kebijakan yang dilakukan pemerintah termasuk kebijakan pajak dapat mempengaruhi pertumbuhan ekonomi dalam jangka panjang. Teori Barro dan Martin ini

digambarkan dengan U terbalik yang dapat diartikan bahwa dalam titik maksimum tertentu tarif pajak maksimal akan mendorong laju pertumbuhan konsumsi, dimana konsumsi merupakan fungsi dari utility yang menggambarkan welfare atau growth, namun apabila tarif pajak sudah melebihi dari titik maksimum maka akan menyebabkan penurunan laju pertumbuhan ekonomi (Setiabudi, 2017).

Peranan penerimaan pajak dalam pembangunan memberikan kontribusi sebesar 75% APBN. Dilihat dari data statistik peranan pajak terus mengalami kenaikan dari 74% pada tahun 2014 menjadi 89,1% pada APBN 2019. Menurut data laporan Direktorat Jendral Pajak (DJP) penerimaan pajak paling besar masih didominasi oleh pajak koperasi dan pajak badan atau perusahaan. Rasio pajak di Indonesia masih tergolong rendah dalam 10 tahun terakhir, hal ini disebabkan oleh masih berkurangnya warga negara Indonesia yang sadar akan wajib pajak. Berdasarkan Surat Pemberitahuan (SPT) tahunan DJP 2018 tingkat kepatuhan bayar pajak 78% dari wajib pajak terdaftar (OJK, 2020).

Berikut merupakan penerimaan pajak Indonesia pada periode waktu 2019-2023:



Sumber : BPS Indonesia, 2024

**Gambar 1. 4 Penerimaan Pajak Indonesia Tahun 2019-2023 (Milliar USD)**

Dilihat dari periode 2019-2023 penerimaan pajak Indonesia mengalami penurunan pada tahun 2019-2020, dan mengalami kenaikan pada tahun 2021-2022. Pada periode 2019-2022 pendapatan pajak tertinggi berada di 2022 sebanyak 177,1 miliar USD dan pendapatan pajak paling rendah yaitu pada tahun 2020 yaitu sejumlah 51,50 Miliar USD.

Pada Gambar 1.4 pada tahun 2019 yang mencapai sebesar 63,90 Miliar USD. Menurut Direktur potensi dan kepatuhan penerimaan pajak Yon Aarsal menurunnya penerimaan pajak pada tahun 2019 ini dikarenakan adanya tekanan pasar global yang menyebabkan permintaan terhadap ekspor menjadi menurun. Menurunnya permintaan ekspor yang menyebabkan produksi dan produktivitas perusahaan lokal ikut menurun, sehingga berdampak pada penerimaan pajak (Kemenkeu, 2023)

Pada tahun selanjutnya wabah Covid-19 melanda sehingga penerimaan pajak kembali menurun mencapai angka 51,50 Miliar USD pada tahun 2020. Pendapatan pajak kembali mengalami peningkatan pada tahun 2021 yang sebesar 59,40 Miliar USD. Penerimaan pajak kembali menguat setelah penanganan pasca-Covid19, peningkatan dibantu dengan Pph impor yang cukup baik sehingga mengalami peningkatan. Pada tahun 2022 penerimaan pajak mencapai angka 177,10 Miliar USD. Pada tahun 2022 Indonesia sudah mulai pulih sepenuhnya dari situasi wabah Covid-19, perusahaan lokal serta kegiatan perekonomian lainnya kembali pulih dan sudah berjalan seperti pra-Covid19. Namun pada tahun 2023 penerimaan pajak kembali menurun sebesar 172,9 Miliar USD dikarenakan

penurunan secara signifikan dari harga komoditas, serta penurunan nilai impor (Kemenku, 2024).

Sudirman dalam Sanjaya & Anis (2022) mengatakan bahwa penerimaan pajak dalam kebijakan fiskal adalah penting, dikarenakan adanya wajib pajak pada jumlah tertentu yang dibayar masyarakat akan meningkatkan pendapatan pemerintah. Apabila pendapatan pemerintah naik, maka pemerintah akan menjalani kebijakan-kebijakan dalam membangun suatu negara secara lancar. Meningkatnya pertumbuhan ekonomi maka akan terjadi pemerataan pendapatan masyarakat, karena meningkatnya produksi nasional yang merupakan hasil dorongan dari pemerintah.

Apabila penerimaan pajak naik maka pertumbuhan ekonomi ikut mengalami peningkatan, namun pada tahun 2021-2022 penerimaan pajak di Indonesia mengalami peningkatan dari 59,4 miliar USD menjadi 177,1 miliar USD. Kenaikan dari 2021-2022 sebesar 198,2%, jika dibandingkan dengan pertumbuhan ekonomi dari 2021-2022 yaitu 3,7% menjadi 5,3% di tahun 2022, kenaikan sebanyak 43,3% dalam kurun waktu 1 tahun. Selisih antara kenaikan penerimaan pajak dan pertumbuhan ekonomi yaitu sebesar 155,9%. Mengapa kenaikan antara pajak dan pertumbuhan ekonomi memiliki selisih sebanyak lebih dari 100%, yang dimana pertumbuhan pajak lebih tinggi dibanding dengan pertumbuhan ekonomi, sedangkan penerimaan pajak merupakan pendapatan negara paling utama yang digunakan untuk menjalankan sebuah negara.

Sejauh ini telah dilakukan sejumlah penelitian yang menjadikan pertumbuhan ekonomi sebagai variabel terikat, dengan bonus demografi, *Foreign*

*Direct Investment*, dan juga Pajak sebagai variabel bebas. Penelitian-penelitian dilakukan dalam tahun yang berbeda-beda dan tempat penelitian yang berbeda.

Penelitian Yunita & Sentosa (2019), yang menunjukkan hasil bahwa penerimaan pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia. Penelitian Saragih (2018), yang juga menunjukkan hasil bahwa penerimaan pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia.

Penelitian Purwati & Prasetyanto (2022), yang menunjukkan hasil bahwa bonus demografi berpengaruh signifikan pada pertumbuhan ekonomi Indonesia. Sedangkan penelitian Putri & Nailufar (2022) menghasilkan kesimpulan bahwa bonus demografi berpengaruh negatif dan tidak signifikan pada pertumbuhan ekonomi Jambi pada jangka pendek, tetapi berpengaruh positif dan signifikan pada pertumbuhan ekonomi Jambi pada jangka panjang, sementara itu penelitian Yani, et al (2017) juga menunjukkan hasil pengaruh negatif dan signifikan pada variabel *Dependency Ratio* terhadap pertumbuhan ekonomi di Samarinda.

Penelitian Yuliana, et al (2023) memberikan hasil FDI berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di 7 negara ASEAN. Begitu juga dengan penelitian Zahran (2020), yang memberikan hasil bahwa FDI berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Sedangkan penelitian dari Risamawan & Novia (2020) FDI memiliki pengaruh negatif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia pada jangka panjang di, namun tidak memiliki hasil signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi

Indonesia pada jangka pendek. Penelitian Kholis (2012) juga menyatakan FDI berpengaruh negatif terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia.

Penelitian-penelitian sebelumnya menunjukkan hasil yang berbeda-beda menyangkut pengaruh bonus demografi, FDI, pajak terhadap pertumbuhan ekonomi. Penelitian ini menggabungkan variabel bonus demografi, FDI, dan pajak sebagai variabel bebas dan melihat pengaruhnya terhadap pertumbuhan ekonomi. Penelitian ini menggunakan metode *Auto Regressive Distributed Lag* (ARDL) yang dapat membedakan respon jangka panjang dan jangka pendek variabel bebas terhadap variabel terikat.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Rumusan masalah dari penelitian ini adalah:

1. Bagaimanakah pengaruh bonus demografi terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia dalam jangka pendek dan jangka panjang?
2. Bagaimanakah pengaruh FDI terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia dalam jangka pendek dan jangka panjang?
3. Bagaimanakah pengaruh penerimaan pajak terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia dalam jangka pendek dan jangka panjang?

## **1.3 Tujuan Penelitian**

Tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui pengaruh bonus demografi terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia dalam jangka pendek dan jangka panjang.



2. Untuk mengetahui pengaruh FDI terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia dalam jangka pendek dan jangka panjang.
3. Untuk mengetahui pengaruh penerimaan pajak terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia dalam jangka pendek dan jangka panjang.

#### **1.4 Manfaat Penelitian**

Manfaat dari penelitian ini adalah:

1. Manfaat Teoritis
  - a. Diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi ilmu pengetahuan, khususnya ilmu ekonomi pembangunan, dan menjadi referensi bagi peneliti-peneliti selanjutnya yang akan meneliti tentang pengaruh bonus demografi, FDI, penerimaan pajak, dan pertumbuhan ekonomi di Indonesia.
  - b. Diharapkan penelitian ini dapat bermanfaat bagi penelitian selanjutnya yang ini terkait dengan bonus demografi, FDI, penerimaan pajak, dan pertumbuhan ekonomi
2. Manfaat Praktis
  - a. Bagi pemerintah, sebagai masukan dan pertimbangan dalam mengkaji pengaruh bonus demografi, FDI penerimaan pajak dan pertumbuhan ekonomi di Indonesia.
  - b. Bagi pengusaha dan masyarakat, sebagaimana tambahan pengetahuan dan bahan pertimbangan dalam melakukan aktivitas-aktivitas ekonomi

yang berhubungan dengan bonus demografi, FDI, penerimaan pajak dan pertumbuhan ekonomi.